

# RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) TAHUN 2025 *“Berjaya”*



**BALAI LABKESMAS BATAM**  
**Menuju WBK/WBBM**

## KATA PENGANTAR

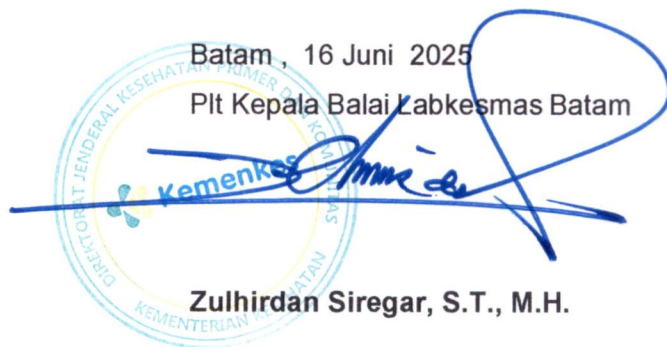
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada semua unit kerja khususnya Balai Labkesmas Batam.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Labkesmas Batam pada tahun 2025, yang diusulkan sebagai unit kerja WBK/WBBM. Untuk mewujudkan WBK/WBBM, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Balai Labkesmas Batam berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.

Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Balai Labkesmas Batam.

Batam, 16 Juni 2025

Pit Kepala Balai Labkesmas Batam



**Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.**

**RENCANA AKSI KEGIATAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
BALAI LABKESMAS BATAM  
TAHUN 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menciptakan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara berkelanjutan pada birokrasi pemerintah agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita zero tolerance approach.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka institusi perlu untuk menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penetapan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Balai Labkesmas Batam melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Balai Labkesmas Batam dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Balai Labkesmas Batam.

Adapun dalam rangka mewujudkan WBK, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam menyelenggarakan pembangunan zona integritas melalui 6 area perubahan dengan tujuan :

1. Meningkatnya transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN yang adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
4. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai keberhasilan pencapaian program organisasi
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

### **C. Pengertian Umum**

1. Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Unit Kerja adalah serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
5. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/ WBBM.

6. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

## **BAB II**

### **RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Labkesmas Batam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenkes No. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pembangunan Zona Integritas mempunyai 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

#### **I. KOMPONEN PENGUNGKIT**

##### **A. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Program Manajemen Perubahan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut :

1. Penyusunan Tim Kerja Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan, dan inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen pengungkit) Zona Integritas, dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:
  - a. Mengusulkan Pembentukan/revisi tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

- b. Menyusun kriteria/prosedur anggota Tim yang akan dipilih
  - c. Perubahan SK tim Kerja
2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah program kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi target(sasaran), rencana kegiatan, waktu, dan hasil yang ingin dicapai, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  - b. Membuat dokumen pembangunan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
  - c. Menyusun mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah di rencanakan sebelumnya. Rencana kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:
- a. Melakukan Evaluasi Bulanan terhadap Rencana kerja tiap Pokja sesuai dengan target
  - b. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
  - c. Melakukan Monev terhadap tindak lanjut hasil evaluasi rencana kerja tiap Pokja.
4. Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik dengan menerapkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi melalui upaya: Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM.
5. Reform
- a. Komitmen Pimpinan;
    - 1. Melakukan monitoring terhadap komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan.
    - 2. Mengusulkan penetapan agen perubahan (AOC)
  - b. Komitmen dalam perubahan
    - 1. Melakukan Monitoring pada Agen perubahan apakah telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)

2. Melakukan pemantauan terhadap perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
  3. Membangun Upaya-upaya budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi untuk perubahan
- c. Membangun Budaya Kerja
1. Melakukan monitoring terhadap pembangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
  2. Mengupayakan keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

## **B. Penataan Tata Laksana**

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM. Program Penataan Tata Laksana memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

1. Rapat Pokja
2. Membuat Peta Proses Bisnis
3. Membuat SOP untuk kegiatan Inovasi dengan kegiatan sebagai berikut ;
  - a. SOP Registrasi Sampel
  - b. SOP Persuratan
  - c. SOP Buku Tamu Digital
4. Monitoring Penerapan SOP
5. Monitoring Evaluasi SOP
6. Revisi SOP Tahun
7. Membuat Buku Tamu Digital
8. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Membuat Daftar Informasi Publik
10. Mengupload Informasi-informasi Publik di Website
11. Membuat Daftar Pemohon Informasi Publik
12. Membuat Prosedur Pengajuan Keberatan
13. Membuat Prosedur Permohonan Informasi
14. Membuat Buletin
15. Monitoring Media Informasi Keterbukaan Informasi Publik (Website, Facebook, Instagram)

### **C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Balai Labkesmas Batam. Program Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut :

1. Laporan Monev Perekrutan
2. Laporan monev Mutasi
3. Laporan Monev Pengembangan
4. Penetapan Kinerja individu
5. Penegakan Disiplin
6. Pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian
7. Assessment Pegawai
8. Pelanggaran Displin Pegawai

### **D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Penguatan Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Program Akuntabilitas Kinerja memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Program
2. Revisi RAK
3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan IKK/PK
5. Evaluasi capaian Kinerja/realisasi
6. Penyusunan LAKIP
7. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
8. Pemberian Reward and Punishment
9. Kerangka Logis Kinerja

### **E. Penguatan Pengawasan**

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memiliki rencana aksi dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengendalian Gratifikasi
  - a. Revisi SK UPG
  - b. Internalisasi UPG
  - c. Sosialisasi UPG
  - d. Inovasi UPG

- e. Evaluasi UPG.
- 2. Penerapan SPIP
  - a. Revisi SK SPIP;
  - b. Internalisasi SPIP;
  - c. Sosialisasi SPIP;
  - d. Review analisis resiko
  - e. Pengendalian resiko melalui SOP yang ditetapkan dan penerbitan SK SKI/PIPK
- 3. Pengaduan Masyarakat
  - a. Revisi SK pengelola Dumas;
  - b. Monitoring Laporan Dumas
  - c. Evaluasi laporan Dumas;
  - d. Tindak Lanjut Evaluasi Dumas;
- 4. Whistle-Blowing System
  - a. Penerbitan SK terkait Dumas;
  - b. Sosialisasi dan Internalisasi WBS;
  - c. Evaluasi WBS;
  - d. Tindakan lanjut evaluasi atas penerapan whistle-blowing system.
- 5. Penanganan Benturan Kepentingan
  - a. Revisi SK Benturan Kepentingan;
  - b. Identifikasi benturan kepentingan;
  - c. Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan;
- 6. Mekanisme Pengendalian
- 7. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 8. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

**F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Adapun target yang ingin dicapai melalui program penguatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- 1. Standar Pelayanan
  - a. Terdapat Kebijakan Standar Pelayanan
  - b. Standar Pelayanan Telah dimaklumkan
  - c. dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
  - d. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- 2. Budaya Pelayanan Prima
  - a. Melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

- b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
  - c. Membuat system pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
  - d. Membuat system pemberian kompensasi kepada layanan bila layanan tidak sesuai standar
  - e. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi
  - f. Melakukan inovasi pelayanan
3. Pengelolaan pengaduan
- a. Membuat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor
  - b. Membentuk unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
  - c. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- a. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
  - b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
  - c. Melakukan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- a. menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
  - b. Melakukan perbaikan secara terus-menerus
  - c. Membangun database pelayanan yang terintegrasi



No	KEGIATAN	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Agt-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	PJ	KETERANGAN								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			I	II	III	IV	I	II	III	IV
ii	<b>Komitmen dalam perubahan</b>																						
a	Melakukan Monitoring pada Agen perubahan apakah telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)													Isnadi	Dokumen Laporan AoC								
b	Melakukan pemantauan terhadap perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen													Isnadi	Laporan evaluasi AOC								
c	Membangun Upaya-upaya budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi untuk perubahan													Budi Santoso dan Imam Dzakirin	List Budaya kerja dan pola pikir baru								
iii	<b>Membangun Budaya Kerja</b>																						
-	Melakukan monitoring terhadap pembangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari													Budi Santoso dan Imam Dzakirin	Monitoring per triwulan								
-	Mengupayakan keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM													Budi Santoso dan Imam Dzakirin	Pertemuan Monev								
<b>II PENATAAN TATA LAKSANA</b>																							
1	Rapat Pokja													Pokja 2									
<b>A. Pemenuhan</b>																							
1	<b>SOP</b>																						
a.	Menerbitkan SK Tim Monev SOP 2025 atau Surat Tugas Pelaksanaan													Tengku Yuliarni dan Sri Handayani	SK Tim Monev 2025								
b.	Menginventaris SOP Sesuai Peta Proses Bisnis dan mengklasifikasi Jenis SOP (SOP Utama, Pendukung dan Inovasi)														Daftar Kendali Dokumen 2025								
c.	Melakukan reviu dan revisi SOP (PMK No. 21 Tahun 2024) Semester I														SOP dan Laporan Kegiatan Reviu SOP Semester 1								
d.	Melakukan reviu dan revisi SOP (PMK No. 21 Tahun 2024) Semester II														SOP dan Laporan kegiatan Reviu SOP Semester 2								
e.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SOP (dilakukan 1 bulan pasca revisi SOP)														Laporan Monev Impelementasi SOP								
2	<b>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>																						
a.	Membuat Laporan Pemanfaatan IT untuk Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi Manajemen SDM dan Pelayanan Publik													Sri Handayani dan Fatrio	Laporan Pemanfaatan IT per 3 bulan								
b.	Monev pelaksanaan Sistem Pengukuran Kinerja, Operasionalisasi Manajemen SDM, dan Pemberian Pelayanan Publik														Laporan Monev per 3 bulan								
c.	Pemantauan Rencana Tindak Lanjut MONEV (dilakukan 1 bulan pasca Monev)														Laporan RTL Monev per 4 bulan								
3	<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>																						
a.	Menerbitkan SK Tim PPID Tahun 2025													Yusniawati dan Fatrio Jodista	SK Tim PPID Tahun 2025								
b.	Membuat daftar informasi publik Tahun 2025														daftar informasi publik tahun 2025								
c.	Membuat daftar informasi publik yang dikecualikan Tahun 2025														daftar informasi publik yang dikecualikan Tahun 2025								
d.	Mengupdate informasi publik yang ada di website														informasi publik yang ada di website di update setiap hari								







No	KEGIATAN	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Agt-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	PJ	KETERANGAN
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV		
5	Penanganan Benturan Kepentingan														
	Melaksanakan Sosialisasi Internal Labkesmas Batam mengenai Penanganan Benturan Kepentingan													Tim Benturan Kepentingan	Undangan, Notulen, Daftar Hadir Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
	Penandatanganan surat pernyataan bebas dari konflik kepentingan bagi KPA, PPK, Kasubag Adum, Ketua Tim Kerja, Kepala Instalasi, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai (PNS dan PPNPN)													Tim Benturan Kepentingan	Dokumen pernyataan yang sudah di tandatangan
	Melaksanakan internalisasi/implementasi regulasi dan prosedur penanganan konflik kepentingan yang terupdate													Tim Benturan Kepentingan	Dokumen/regulasi yang sudah diupdate (Pedoman penanganan benturan kepentingan balai Labkesmas Batam 2025, SOP penanganan benturan kepentingan 2025, surat edaran penggunaan kendaraan dinas 2025 dalam rangka pencegahan benturan kepentingan) dan dokumentasi kuesioner
	Penyebaran kuesioner benturan kepentingan													Tim Benturan Kepentingan	Laporan
	Menindaklanjuti laporan konflik kepentingan													Tim Benturan Kepentingan	Laporan
	Monitoring evaluasi kegiatan													Tim Benturan Kepentingan	Laporan
VI	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>														
	<b>Standar Pelayanan</b>														
1	Membuat kebijakan standar pelayanan														Melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan namun tetap mengacu pada Peraturan terkait Standar Layanan yang terbaru dan SNI ISO/IEC 17025:2008
2	Standar pelayanan telah dimaklumkan														Membuat alur pelayanan yang memuat waktu dan jenis pelayanan yang dapat di layani di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar dalam bentuk banner, brosur /leaflet dan diumumkan di Website
3	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan														Membuat draft SK Tim review standar Pelayanan/ Laporan rewiw
4	Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan														Publikasi standar dan membuat maklumat pelayanan (Penggantian Kepala Satker)
	<b>Budaya Pelayanan Prima</b>														
5	Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima													Tim Pokja VI	Pelatihan/ Sosialisasi Pelayanan Prima
6	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media													Tim Pokja VI	Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (website, banner, papan pengumuman dan brosur/leaflet)
7	Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan													Tim Pokja VI	SK sistem dan SOP prosedur penilaian pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan
8	Terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar													Tim Pokja VI	SK sistem dan SOP prosedur penilaian pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan



**BAB IV**  
**TARGET-TARGET PRIORITAS TIM ZI**  
**BALAI LABKEMAS BATAM 2025**

<b>POKJA WBK/WBBM</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>RENCANA KEGIATAN</b>	<b>RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)</b>	<b>TARGET (JUMLAH DOKUMEN)</b>	<b>KETERANGAN</b>	
<b>POKJA 1</b>	Penyusunan Tim Kerja ZI	Pembentukan tim kerja & kriteria prosedur pemilihan	April	1	SK dan Dokumen Pendukung	
	Rencana Pembangunan ZI	Membuat rencana kerja ZI dan target prioritas	Juni	1	Dokumen rencana kerja dan target prioritas	
	Tim Agen Perubahan Balai Labkesmas Batam	Pembentukan Tim Agen Perubahan		Mei	1	SK & dokumen pendukung
		Pemantauan Kegiatan AoC		Mei - Desember	3	Dokumen Pemantauan
		Evaluasi Kegiatan AoC		Juni - Desember	2	Dokumen Evaluasi
	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Identifikasi Pola Pikir dan Budaya Kerja di tiap Timker, Instalasi dan Adum		Mei	1	Dokumen Identifikasi
		Pemantauan penerapan Pola Pikir dan Budaya Kerja baru secara periodik		Mei - Desember	3	Dokumen Pemantauan
		Evaluasi penerapan Pola Pikir dan Budaya Kerja baru secara periodik		Juni - Desember	2	Dokumen Evaluasi
	<b>POKJA 2</b>	Reviu SOP untuk seluruh area unit kerja	Finalisasi SOP yang sudah direvisi oleh masing - masing PJ yang disesuaikan dengan peta proses bisnis	Juni	1	Laporan Reviu SOP Semester 1
Identifikasi SOP yang tidak digunakan lagi, disesuaikan dengan peta proses bisnis						
	Inovasi Transformasi Digital	Perencanaan Inovasi Transformasi Digital pada bidang pelayanan publik	September	1	Dokumen Rencana Inovasi Tranformasi Digital	
<b>POKJA 3</b>	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Monev kegiatan pelatihan	Agustus	1	Dokumen Training need analysis	

<b>POKJA 4</b>	Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah	Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan BLKM Batam Tahun 2025-2029	Juli	1	Dokumen RAK
<b>POKJA 5</b>	Pengendalian Gratifikasi	Kampanye anti gratifikasi di media sosial	Jan, Mar, Mei, Jul, Sep, Nov	1	Dokumen Bukti Screenshoot Vidio, narasi, Flyer
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengumpulan data Manajemen Resiko	Januari, Juli	4	SK, Piagam dan Laporan Manajemen Resiko
		Inovasi ViRA	Juni	4	Dokumen Hasil BA Tim Penilai ViRA, Pemenuhan Kriteria Inovasi ViRA, Manual Book ViRA dan Justifikasi & Penejelasan ViRA
	Pengaduan Masyarakat	Sosialisasi Pengaduan masyarakat melalui video	Mei - Desember	3	Undangan, Daftar hadir sosialisasi Dumas, Notulen
		Sosialisasi dalam kegiatan Labkesmas Batam yang melibatkan pihak eksternal	Juni	1	Dokumen Screenshoot Vidio, narasi
		Menyelipkan hotline pengaduan masyarakat di dalam penawaran pelayanan	Juni	1	Leaflet
	Whistle Blowing System (WBS)	Melakukan monitoring dan evaluasi permintaan data laporan pengaduan masuk ke Itjen Kemenkes RI	Juli , Desember	2	Surat permintaan data terkait laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi WBS terintegrasi

	Penanganan Benturan Kepentingan	Melaksanakan Sosialisasi Internal Labkesmas Batam mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	Juni	3	Undangan, Notulen, Daftar Hadir Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
		Penandatanganan surat pernyataan bebas dari konflik kepentingan bagi KPA, PPK, Kasubag Adum, Ketua Tim Kerja, Kepala Instalasi, Pejabat Pengadaan, Bendahara dan penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pegawai (PNS dan PPNP)	Januari, Februari	72	Dokumen pernyataan yang sudah di tandatangan
<b>POKJA 6</b>	Pemberian Reward layanan	Diberikan kepada pemberi Layanan (Tim Analis Laboratorium Biologi dan Tim Pelaksana layanan Laboratorium Uji)	April	1	Dokumen
	Diadakanya Forum Konsultasi Publik	Pemberian penghargaan kepada konsumen ( mewakili RS, Instansi Pendidikan, dan perusahaan)	Mei	1	Dokumen
	Sosialisasi Panduan Standar Interaksi Pelayanan Publik	kepada seluruh Sekurity di Labkesmas Batam	Mei	1	Dokumen
	Pembentukan Unit Pengaduan (Dumas, SP4N Lapor, WBS, UPG, COI)	Penyusunan Tim Unit pengaduan	Juli	1	Dokumen

## BAB IV PENUTUP

Outcome dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas adalah terciptanya WBK/WBBM di Balai Labkesmas Batam. Pengembangan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai IPK Kementerian Kesehatan khususnya dan IPK Indonesia umumnya.

Rencana aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM yang diyakini semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan masih panjang, butuh kerja keras dan komitmen bersama-sama untuk menjadikan Kementerian Kesehatan RI yang bersih dari korupsi.